

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 55 2023

#### TENTANG

# KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

#### **KEPALA DINAS**

### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan masyarakat pada Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Boalemo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan pemberdayaan Kabupaten masyarakat dan desa Boalemo tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Boalemo;

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2011 2014:
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOALEMO TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOALEMO

PERTAMA;

Menetapkan Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo.

**KEDUA** 

Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atau pengaduan atas adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Prosedur Pelayanan (SPP) pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo:

KETIGA:

Sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA maka, masyarakat berhak atas kompensasi berupa:

♦ Kompensasi berupa permohonan maaf dari Petugas dalam bentuk penyampaian informasi yang menjadi kendala sehingga pelayanan Mengalami Keterlambatan

**KEEMPAT** 

Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi, berada di tangan Tim Pejabat Pengelola Pengaduan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat;

**KELIMA** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di Tilamuta Pada Tanggal 23 juni 2023

Kepala Dinas,

Dra.Monru Mopangga NIP. 1966093019970220